

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, laporan keuangannya yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan keuangan yang lain serta materi penjelas yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, skejul dan informasi tambahan lainnya yang berkaitan dengan laporan tersebut (IAI, 2002). Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki / dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku (Abdul Halim, 2007).

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau

lembaga dilingkungan pemerintah pusat dan suatu organisasi dilingkungan pemerintah pusat atau daerah.

### **2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukan (Said dan Noch, 2018). Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip. Laporan keuangan menentukan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dikatakan berkualitas, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) juga dikatakan berkualitas dan bermanfaat, apabila informasi tersebut berguna oleh para penggunaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib

memperhatikan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntan Publik menyatakan karakteristik laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik untuk memenuhi kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu sebagai berikut:

a. Relevan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dikatakan relevan, apabila mempegaruhi keputusan pengguna yaitu dengan cara membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi tersebut dikatakan relevan apabila:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi dimasa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

Informasi yang disajikan secara tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin meliputi seluruh informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

1. Penyajian jujur, menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Dapat diverifikasi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih

berguna, apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan, apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan, apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Oleh karena itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

### **2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan umum laporan keuangan daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber

daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan (Mardiasmo, 2006):

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

#### **2.1.4 Jenis-jenis Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan mengenai realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah pusat/daerah.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Laporan Operasional

Laporan neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional berupa ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas serta penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

e. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan mengenai aset, kewajiban serta ekuitas pada akhir periode/tahun tertentu.

f. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Laporan arus kas juga menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi mengenai penjelasan pos-pos laporan keuangan yang disajikan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang harus dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta informasi mengenai ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

## **2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

### **2.2.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau wewenang untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Yendrawati, 2013).

Kompetensi menurut (Wibowo, 2013) adalah tingkat keterampilan, pengetahuan dan tingkah laku yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugasnya dalam organisasi. Sedangkan menurut Sudiarti

(2020) mengungkapkan jika kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Jadi secara umum, kompetensi sumber daya manusia adalah tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang guna untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi kemampuan dan pengetahuannya, maka semakin tinggi juga kualitas kompetensi sumber daya manusianya.

### **2.2.2 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi sumber daya manusia diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Patrini dalam Anggadini (2021):

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan serta pemahaman bagaimana cara menggunakan informasi yang tepat dan benar di bidangnya masing-masing dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Keterampilan (*skill*)

Kemampuan yang dimiliki seorang karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung

3. Perilaku (*attitude*)

Pola dan perilaku seseorang karyawan yang sangat mendukung karakternya sebagai seseorang yang berada pada lingkungan

masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan instansi. Perilaku atau *attitude* merupakan modal seseorang dalam membawa diri dalam pergaulan dan bekerja sama dengan pihak lain karena hal ini menentukan diterima atau tidaknya seseorang dalam lingkungan masyarakat.

## **2.3 Akuntabilitas**

### **2.3.1 Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi amanah atas suatu kinerja atau program yang telah dilakukan (Septiningtyas, 2018). Dengan adanya akuntabilitas, maka proses pelaporan keuangan pemerintah daerah harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akuntabilitas yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Maka akuntabilitas dapat dijadikan prasyarat terwujudnya pemerintah yang baik atau disebut dengan *good governance*.

Akuntabilitas terdiri dari dua jenis yang dikemukakan oleh Mahmudi (3013) yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal itu sendiri adalah pertanggung jawaban unit-unit pengelolaan dana kepada pemerintah daerah, petanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan

Akuntabilitas horizontal yaitu pertanggung jawaban kepada masyarakat luas.

Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan dari reformasi publik. Tuntutan akuntabilitas publik/pemerintah mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggung jawaban horizontal bukan hanya pertanggung jawaban vertikal. Tuntutan yang muncul adanya perlu dibuat laporan keuangan eksternal yang menggambarkan kinerja lembaga sektor publik/pemerintah.

Selain itu menurut Revrisond Basir (2000) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam memubuat keputusan ekonomi maupun politik. Akutabilitas dapat diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut.

### **2.3.2 Indikator Akuntabilitas**

Pada penelitian Feny dan Yohanes (2019) terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas individu yaitu:

#### **1. Motivasi**

Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan

untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam hidup.

## 2. Kewajiban sosial

Kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

## 3. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki serta keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang.

## **2.4 Penelitian Terdahulu**

Untuk memperkaya perspektif penelitian ini, maka selain dari kajian teori yang dijelaskan, dilakukan review terdahulu beberapa penelitian sebelumnya:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Azza dan Nugraeni (2023)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Pemerintah Kabupaten Sleman).	Regresi linear sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2.	Afri Mulia (2018)	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat).	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
3.	Arini dan Dadang (2021)	Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
4.	Nabila, Dwi dan Astrid (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo.	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
5.	Putri (2022)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya).	Regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
6.	Ridho Pratama (2023)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi dan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

## 2.5 Perumusan Hipotesis

### 1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Menurut Kadek Desiana Wati dkk (2015) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya dalam lingkungan pekerjaannya. Semakin tinggi kemampuan dan pengetahuannya, maka semakin tinggi juga kualitas sumber daya manusianya.

Menurut Afri Mulia (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila, Dwi dan Astrid (2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian oleh Putri (2022) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

**H<sub>1</sub>: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.**

### 2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi amanah atas suatu kinerja atau program yang telah dilakukan (Septiningtyas, 2018). Dengan adanya akuntabilitas, maka proses pelaporan

keuangan pemerintah daerah harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akuntabilitas yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Maka akuntabilitas dapat dijadikan prasyarat terwujudnya pemerintah yang baik atau disebut dengan *good governance*.

Menurut penelitian Arni dan Dadang (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridho Pratama (2023) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azza dan Nugraeni (2023) akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

**H<sub>2</sub>: Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.**

3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan

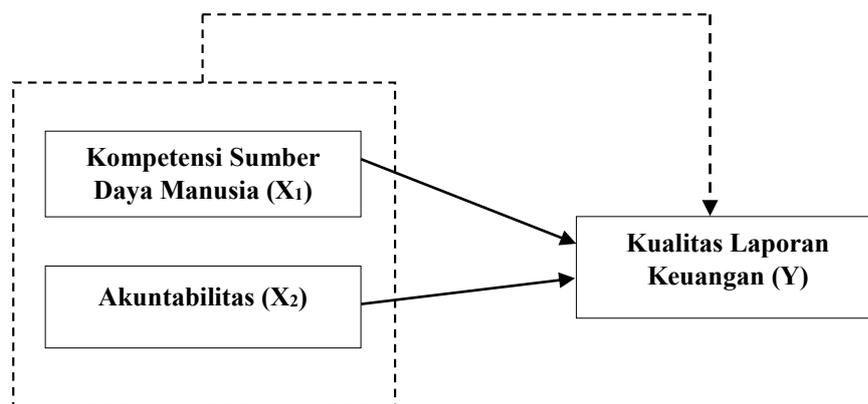
Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas bersama-sama akan membuat seorang pegawai mempunyai kualitas yang sangat baik. Adanya dua faktor ini akan mempermudah seorang pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah, cermat dan cepat. Dengan kompetensi yang dimiliki akan membantu ia dalam menjalankan suatu pekerjaan. Kompetensi yang ia butuhkan dalam melakukan menyusun laporan keuangan yaitu pengetahuan, keterampilan dan perilaku.

Dalam menyusun laporan keuangan seorang pegawai yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan harus memiliki sikap akuntabilitas yang tinggi, semakin tinggi akuntabilitas yang dimiliki oleh seorang pegawai tersebut maka bisa dipastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas.

**H<sub>3</sub>: Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.**

## 2.6 Kerangka pemikiran

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



**Keterangan:**

Pengaruh secara parsial                       $\longrightarrow$

Pengaruh secara simultan                       $\dashrightarrow$